

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan

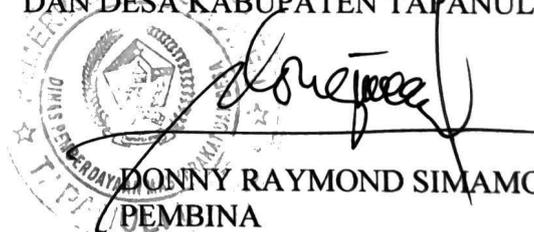
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya untuk mewujudkan rencana strategis yang telah disusun, berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Kami sadari bahwa penyajian laporan ini masih kurang sempurna, kami sangat mengharapkan peran serta seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kualitas laporan dengan memberikan kontribusi secara aktif agar dapat diperoleh laporan yang lebih baik.

Tarutung, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA,



DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM  
PEMBINA  
NIP. 197408112003121003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depannya. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan persentase capaian realisasi kinerja utama dari sasaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 96% dengan kategori “tinggi” sedangkan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.5.933.153.639,- terealisasi Rp. 5.792.461.956,- atau capaian penyerapan anggaran sebesar 97 %. (*data sebelum audit oleh BPK*).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>3</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>31</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Review atas Laporan kinerja Instansi pemerintah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi hal penting dalam Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Renstra PD. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai sumber informasi untuk mengetahui keberhasilan / kegagalan kinerja PD selama kurun waktu satu tahun anggaran dan sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang secara berkesinambungan, dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya status desa		Jumlah desa naik status	38	24	26	30	35
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	0	0	97%	98%	99%
	Persentase SiLPA penggunaan APBDesa		1,2%	3%	2%	1,5%	1%	
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif		16%	60,45%	60%	80%	90%	
	Persentase lembaga adat yang aktif		n/a	31,53%	60%	80%	90%	
	Persentase BUMDes yang aktif		70%	90,97%	60%	65%	70%	
	Jumlah BUMDesMa yang terbentuk		0	1	8	16	17	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	67	55,01	77	78	80	

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya pengelolanya. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antra penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 telah dibuat dan disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara ditahun 2023 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1 Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	98%
		2 Persentase SiLPA penggunaan APBDesa	Persen	1,5%
		3 Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	80%
		4 Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80%
		5 Persentase BUMDes yang aktif	Persen	65%
		6 Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	16
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7 Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	78
No	Program	Anggaran	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 3.034.800.430,-	APBD	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 414.917.100,-	APBD	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.772.923800,-	APBD	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 710.512.300,-	APBD	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai Akuntabilitas berikut:

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

- 1) Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan triwulanan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
- 2) Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni;

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus;

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, digunakan rumus

➤ yang satuan indikatornya dalam persen (%);

$$\text{Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

➤ satuan indikatornya bukan dalam persen (%).

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa capaian atas realisasi kinerja dikelompokkan dalam interval dan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022		Capaian	Tahun 2023		Capaian
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	97	97,1	100	98	84,2	98
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	2	1.8	100	1,5	1.7	81
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	60	64,2	100	80	97,7	100
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	60	50	83	80	93,3	100
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	60	57	95	65	43,9	67
		6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	8	8	100	16	16	100

2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	77	65,2	84	78	65,9	84
---	---	---	---------------------------	-------	----	------	----	----	------	----

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rata rata persentase capaian dari realisasi Tahun 2023 berada pada 90% dengan kategori tinggi. Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas capaian tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

### A.1 Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sasaran kinerja meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kerjasama desa ditunjukkan melalui 6 indikator kinerja antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian	Tahun 2023		Capaian	
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	97	97,1	100	98	84,2	98
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	2	1.8	100	1,5	1.7	81
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	60	64,2	100	80	97,7	100
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	60	50	83	80	93,3	100
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	60	57	95	65	43,9	67
		6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	8	8	100	16	16	100

1. Indikator Kinerja pertama yaitu Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK.

Pada Tahun 2023 capaian indicator kinerja Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK dengan target 98% realisasi sebesar 84,2%. SOTK Desa sebagaimana dimaksud yakni : 1Orang Sekretaris Desa; 2 Orang Kepala Urusan; dan 2 Orang Kepala Seksi. Tahun 2023 Jumlah Pemerintah Desa yang memiliki perangkat desa defenitif seusi dengan SOTK sebesar 203 Pemerintah Desa dari 241 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini karena adanya perangkat desa yang mengundurkan diri untuk pekerjaan yang lain, diberhentikan oleh Pemerintah Desa dan meninggal dunia sehingga adanya penurunan

pencapaian dari tahun 2022. Pada Tahun 2022 untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa Tahun 2022 telah dilakukan seleksi Perangkat Desa di 241 Se-Kabupaten Tapanuli Utara sehingga jumlah Perangkat Desa Tahun 2022 sebanyak 1.192 dengan jumlah desa yang lengkap perangkat desa sesuai SOTK sebanyak 234 dari 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara atau sebesar 97%.

Pada Tahun 2024 mekanisme Seleksi Perangkat Desa akan dilakukan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa.



<b>Program/Kegiatan/ sub kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Pelaksana Kegiatan</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	160 Dokumen	150 Dokumen	Perlu peningkatan SDM Kepala Desa dan perangkat desa yang baru	Pelatihan dan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa yang baru	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	241 Dokumen	190 Dokumen	masih ada desa yang tidak menyampaikan data profil desanya untuk dientri	direncanakan untuk menampung anggaran pengisian profil desa di APBDes masing masing desa sesuai dengan kebutuhan	Desa
Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	-	-	

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Penanggungjawab
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	56.788.000	51.631.250	99%	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7.337.600	7.237.600	99%	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.556.210.000	1.541.434.424	99%	
Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	414,917,100	401,948,448	97%	

2. Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase SiLPA penggunaan APBDes.

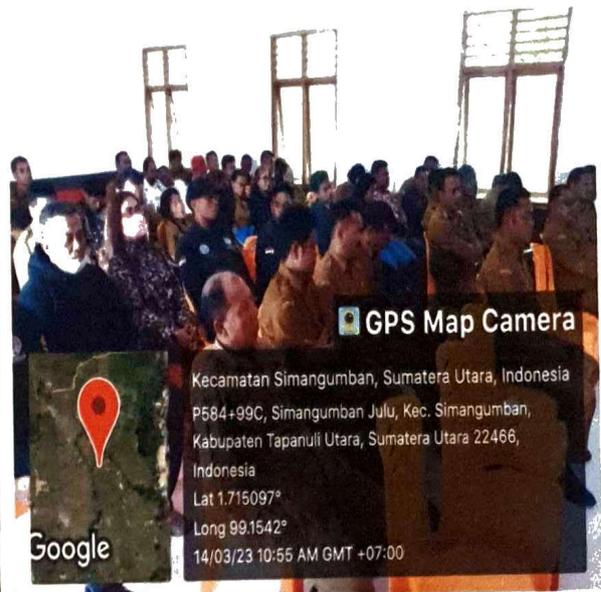
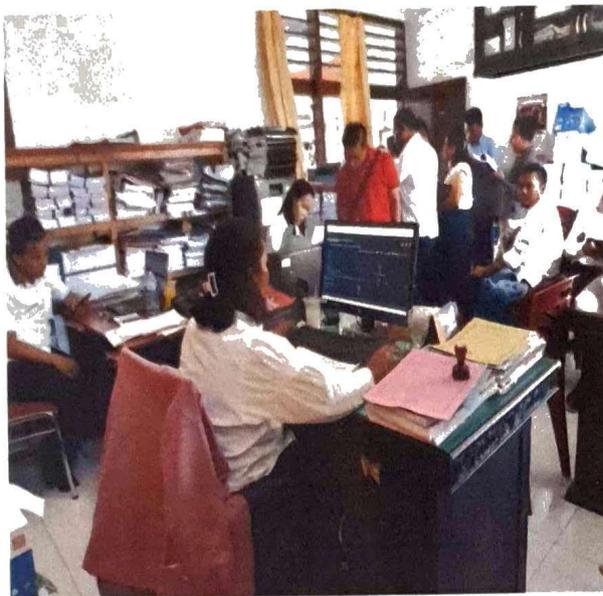
Untuk mendukung indikator persentase SiLPA penggunaan APB Desa dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Turun ke lapangan dalam rangka fasilitasi percepatan penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa Tahun 2022
2. Penyusunan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Pedoman pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023
3. Fasilitasi penyusunan APB Desa dengan langsung fasilitasi di Kantor maupun di Kecamatan.

4. Fasilitasi pengentrian APB Desa melalui Aplikasi Siskeudes 2023 dengan metode Pemerintah Desa datang ke Kantor DPMD
5. Fasilitasi proses pengajuan penyaluran Dana Desa tiga tahap dan Alokasi Dana Desa dua tahap
6. Fasilitasi percepatan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahap
7. Monitoring beberapa desa penggunaan dana desa.
8. Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah disalurkan 100% pada Desember 2023.

Fasilitasi yang dilaksanakan berupa fasilitasi dalam hal penyusunan APB Desa dan dalam hal pelaksanaan Kegiatan APB Desa. Fasilitasi juga dilaksanakan dalam hal penyaluran anggaran ke Rekening Kas Desa baik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi pengelolaan aset desa. Fasilitasi yang dilakukan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa diharapkan dapat mengurangi SiLPA APBDes. Pada tahun 2023 kondisi SiLPA tertanggal 30 Januari 2024 sebesar 1,78% atau Rp. 579.564.040,- dengan anggaran sebesar Rp. 32.571.320.204,- dan realisasi Rp. 31.991.756.164,- dari 28 Desa yang telah melaporkan realisasi anggaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 besar SiLPA sebesar 1,8 % SiLPA tahun 2023 menurun dari tahun 2022 walaupun tidak mencapai target pada tahun 2023 sebesar 1,5%.





Dalam hal penyusunan APB Desa, Dinas PMD melaksanakan Fasilitasi kepada 241 Desa, yang difasilitasi adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengoperasikan Aplikasi Siskeudes. Dalam hal pelaksanaan APB Desa telah dilaksanakan pembinaan bersama TAPM Kabupaten Tapanuli Utara kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bertempat di Kecamatan. Dalam hal penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (DD), dan Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah telah dilaksanakan Fasilitasi penyaluran DD sebanyak tiga Tahap, ADD sebanyak 2 tahap dan DBH sebanyak satu tahap, sehingga anggaran tersalur ke RKD 100%.

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Laporan	7 Laporan	Kapasitas perangkat desa belum optimal dan perlu adanya pelatihan langsung ke desa	pembinaan harus dilaksanakan langsung ke desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa	Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi pengelolaan aset desa	0	0	Rasionalisasi anggaran	Fasilitasi desa	

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Penanggungjawab
Fasilitasi pengelolaan aset desa	588,100	-	0	Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	77,095,000	76,078,596	99%	

3. Indikator Kinerja ketiga yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif.

Fasilitasi yang dilaksanakan antara lain supervisi/pembinaan, monitoring dan terakhir evaluasi 10 program pokok PKK. Rumus persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif yaitu

$$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa}} \times 100\%$$

Indikator persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif dengan target tahun 2023 sebesar 80% dan realisasi 97,79%. Ada sebanyak 40 Desa yang difasilitasi kelembagaanya antara lain PKK 241 Desa, Karang Taruna 15 desa, Posyandu sebanyak 412 dan LPM 39 Desa. Sedangkan untuk target Tahun 2022 persentase jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang sebesar 60% dan realisasi 64,23%. Fasilitasi yang dilaksanakan antara lain sosialisasi, kelembagaan Posyandu, supervisi/ pembinaan, monitoring dan evaluasi 10 program pokok PKK. Untuk kelembagaan Posyandu sedang dalam proses pengajuan Peraturan Bupati yang mengatur Posyandu sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Untuk Kelembagaan Karang Taruna dalam tahap koordinasi dengan perangkat Daerah pengampu lainnya (Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara) sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pembinaan terhadap Kelembagaan Karang Taruna.



Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif yaitu :

Kegiatan	Target	Realisasi	Penyebab keberhasilan	Solusi yang telah dilakukan	Pelaksana Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	195 lembaga	195 lembaga	Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa aktif dan antusias untuk melaksanakan dan mengikuti setiap program pembinaan dan aktifnya failitasi tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Turun langsung dalam setiap tahapan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	1 unit			

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Penyerapan Anggaran</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100,000,000	99,436,900	99%	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327,337,600	320,066,479	98%	

#### 4. Persentase lembaga adat yang aktif

Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Indikator kinerja persentase lembaga adat yang aktif dilaksanakan oleh 1 Bidang yaitu: Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu :

##### 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2023 yaitu rapat rapat,

LADN, pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan tokoh tokoh adat di desa serta ikut aktif dalam pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Rumus persentase LADN yang aktif yaitu

$$\frac{\text{Jumlah LADN yang aktif}}{\text{Jumlah LADN}} \times 100\%$$

Tahun 2023 target persentase lembaga adat yang aktif sebesar 80% dengan realisasi sebesar 93,36% yang diperoleh dari jumlah lembaga adat yang aktif sebanyak 225 Desa per jumlah lembaga adat yang ada sebanyak 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Adanya peningkatan lembaga adat yang aktif karena adanya kegiatan konsolidasi tentang Tarombo Halak Batak dan pembatasan waktu pesta adat yang diselenggarakan di 15 Kecamatan. Tahun 2022 persentase lembaga adat yang aktif sebesar 60% dan realisasi sebesar 50,2%. Kegiatan yang diikuti antara lain LADN dan LAD menghadiri undangan Tingkat Kabupaten dan acara adat yang diselenggarakan di Desa. Untuk tahun berikutnya diharapkan adanya peningkatan anggaran kegiatan dalam rangka sosialisasi peran aktif menyangkut tugas, pokok dan fungsi dari LADN dan LAD sehingga LADN dan LAD berperan aktif dalam pelestarian adat istiadat dan pembangunan di Desa.





Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Penanggung Jawab
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Tahun	1 Tahun	-	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indicator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	166,527,500	166,527,509	100%	Hibah

#### 5. Persentase BUMDes yang aktif

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif dilaksanakan oleh Bidang yaitu: Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dilakukan dengan pembinaan terhadap :

1. Penggunaan penyertaan modal untuk usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDESA.
2. Struktur organisasi BUMDESA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penyampaian tupoksi dari masing-masing pelaksana operasional BUMDESA.
4. Kelengkapan administrasi hukum terkait BUMDESA; Perdesa, Perkades, SK pengurus BUMDESA, Program kerja, Revitalisasi dan pendaftaran ke kemenkumham serta laporan keuangan BUMDESA.

Rumus persentase BUMDes yang aktif yaitu

$$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang aktif}}{\text{Jumlah BUMDes}} \times 100\%$$

BUMDesa aktif Tahun 2023 sebanyak 54 BUMDesa dengan jumlah BUMDesa sebanyak 123, target tahun 2023 BUMDes aktif sebesar 65% namun realisasi hanya sebesar 43,9%. Tidak terpenuhinya target presentase BUMDesa aktif dikarenakan adanya pergantian Kepala Desa Baru yang mengganti posisi Penasehat pada BUMDesa, sehingga mempengaruhi aktifitas BUMDesa dan kurangnya Penyertaan Modal untuk BUMDesa. Adanya pengurus BUMDesa yang tidak aktif dan kurang memahami tentang tatacara penatausahaan BUMDesa sehingga banyak BUM Desa yang tidak membuat laporan musyawarah pertanggungjawaban. Solusi yang dilaksanakan yaitu tetap melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BUMDesa agar tetap sehat dan berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahun 2022 Indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif sebesar 57% dengan target 85%. Bahwa BUMDes di Kabupaten Tapanuli Utara sudah memiliki Sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 26 BUMDes

dari yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Daftar BUMDesa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama BUMDes</b>	<b>Aktif/Tidak Aktif</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Siatas Barita	Lumban Siagian Julu	Gabe Jaya	Aktif
2	Siatas Barita	Siraja Hutagalung	Sirahut Nauli	Aktif
3	Siatas Barita	Pansurnapitu	Mandiri	Aktif
4	Siatas Barita	Sidagal	SATAHI	Aktif
5	Siatas Barita	Simorangkir Habinsaran	Maju Bersama	Aktif
6	Siatas Barita	Sangkalan	Saribu Raja Jaya	Aktif
7	Pangaribuan	Parlombuan	Parsada	Aktif
8	Pangaribuan	Rahutbosi	Rahutbosi Jaya	Aktif
9	Pangaribuan	Pansurnatolu	Doloksaut	Aktif
10	Pangaribuan	Parsorminan I	Satolop	Aktif
11	Pangaribuan	Batunadua	KTB Jaya	Aktif
12	Pangaribuan	Harianja	Harianja Maju	Tidak Aktif
13	Pangaribuan	Sampagul	Sampagul Jaya	Aktif
14	Pangaribuan	Sigotom Timur	Tumagon	Tidak Aktif
15	Pangaribuan	Parraturan	Parraturan	Tidak Aktif
16	Pangaribuan	Najumambe	Nasari Silima ompu	Aktif
17	Pangaribuan	Silantom Julu	Bersama	Aktif
18	Pangaribuan	Batumanumpak	Bahagia	Aktif
19	Pahae Julu	Simasom	Simasom Jaya	Aktif
20	Pahae Julu	Hutabarat	Marsiurupan	Tidak Aktif
21	Pahae Julu	Pantis	Harapan	Aktif
22	Pahae Julu	Simasom Toruan	Saroha	Aktif
23	Simangumban	Lobu Sihim	Lam Maju	Tidak Aktif
24	Simangumban	Pardomuan	Maju Bersama	Tidak Aktif
25	Simangumban	Simangumban Julu	Satahi	Tidak Aktif
26	Simangumban	Aek Nabara	Karya Bersama	Tidak Aktif
27	Simangumban	Simangumban Jae	Haholongan	Tidak Aktif
28	Simangumban	Silosung	Maju Bersama	Tidak Aktif
29	Simangumban	Dolok Saut	Dolok Saut Nauli	Tidak Aktif
30	Purbatua	Sitolubahal	Karya Bersama	Tidak Aktif
31	Purbatua	Hutanagodang	Bergiat Sukses	Aktif
32	Purbatua	Sidua Bahal	Aek Sulum	Tidak Aktif
33	Purba Tua	Sibulan Bulan	Maju Jaya	Tidak Aktif
34	Purba Tua	Bonani Dolok	Langit Biru	Tidak Aktif
35	Purba Tua	Pardomuan Janjiangkola	Bersinar	Aktif
36	Purba Tua	Robean	Sikompak	Tidak Aktif
37	Purba Tua	Janjinauli	Mandiri	Tidak Aktif
38	Purba Tua	Selamat	Dos Tahi	Tidak Aktif

39	Purba Tua	Purba Tua	Harapan Jaya	Tidak Aktif
40	Purba Tua	Parsaoran J. Angkola	MUAL NATIO	Tidak Aktif
41	Siborong-Borong	Bahal Batu I	Martabe	Tidak Aktif
42	Siborong-Borong	Paniaran	Sipigani	Tidak Aktif
43	Siborong-Borong	Parik Sabungan	Mantap	Tidak Aktif
44	Siborong-Borong	Siborong-Borong 1	Satahi	Aktif
45	Siborong-Borong	Sitabotabo	Sitabotabo Mak	Tidak Aktif
46	Siborong-Borong	Bahal Batu II	Sahata	Tidak Aktif
47	Siborong-Borong	Bahal Batu III	Lumban Holbung	Tidak Aktif
48	Siborong-Borong	Pohan Julu	Bintang Kejora	Tidak Aktif
49	Siborong-Borong	Sigumbang	Sigumbang Jaya	Tidak Aktif
50	Siborong-Borong	Sitampurung	Tupama	Tidak Aktif
51	Siborong-Borong	Pohan Jae	Pohan jae	Tidak Aktif
52	Siborong-Borong	Silaitlait	Rouli	Tidak Aktif
53	Siborong-Borong	Pohan Tonga	Pohan Tonga Jaya	Aktif
54	Siborong-Borong	Hutabulu	Hutabulu Mandiri	Aktif
55	Siborong-Borong	Lobusiregar I	Mandiri Jaya	Tidak Aktif
56	Siborong-Borong	Lobusiregar II	Parade	Tidak Aktif
57	Siborong-Borong	Siborongborong II	Hot Jaya	Tidak Aktif
58	Siborong-Borong	Lumban Tongatonga	Mandiri	Tidak Aktif
59	Siborong-Borong	Sitabotabo Toruan	Mangaranap	Tidak Aktif
60	Muara	Hutanagodang	Muara Anugrah	Aktif
61	Muara	Hutalontung	Saurdot	Tidak Aktif
62	Muara	Hutaginjang	Bina Sejahtera	Tidak Aktif
63	Muara	Dolok Matumbur	Maju Jaya	Tidak Aktif
64	Muara	Sampuran	Sampuran	Aktif
65	Muara	Sibandang	Sibandang Nauli	Tidak Aktif
66	Muara	Simatupang	Jaya Abadi	Aktif
67	Muara	Batubinumbun	Maju Bersama	Aktif
68	Muara	Papande	Jaya Sentosa	Tidak Aktif
69	Muara	Aritonang	Martabe	Aktif
70	Muara	Baribaniaek	Baribaniaek Maju	Aktif
71	Muara	Silalitoruan	Kilang Makmur	Tidak Aktif
72	Muara	Silando	Berkarya	Aktif
73	Muara	Sitanggor	Sitanggor Maju	Tidak Aktif
74	Tarutung	Siandorandor	Martabe	Aktif
75	Tarutung	Siraja Oloan	Najagar	Tidak Aktif
76	Tarutung	Hutatoruan I	Dame Sumurung	Aktif
77	Tarutung	Hutatoruan IV	Hariara Nomensen	Aktif
78	Tarutung	Sitampurung	Une Do	Tidak Aktif
79	Tarutung	Aeksiansimun	Nasari	Aktif
80	Sipahutar	Sipahutar II	Marsada	Aktif
81	Sipahutar	Onanrunggu I	Gurgur	Aktif
82	Sipahutar	Onanrunggu II	Dosroha Jaya	Tidak Aktif
83	Sipahutar	Siabal-abal VI	Sakkar Gukguk	Tidak Aktif

84	Sipahutar	Sipahutar I	Sipasada	Aktif
85	Sipahutar	SabunganNihuta II	Martabe	Aktif
86	Sipoholon	Lobu Singkam	Lobu Singkam Natio	Tidak Aktif
87	Sipoholon	Hutauruk	Makmur Jaya	Aktif
88	Sipoholon	Situmeang Hasundutan	Aek Hajoran	Tidak Aktif
89	Sipoholon	Hutaraja	Marsiurupan	Tidak Aktif
90	Sipoholon	Hutaraja Hasundutan	Dolok Imun	Aktif
91	Sipoholon	Tapian Nauli	Sepakat	Aktif
92	Sipoholon	Hutauruk Hasundutan	POP. Donda Ujung	Tidak Aktif
93	Sipoholon	Simanungkalit	Maju Bersama	Aktif
94	Sipoholon	Sipahutar	Dosroha	Aktif
95	Garoga	Garoga Sibargot	Cinta Damai	Tidak Aktif
96	Garoga	Gonting Garoga	Marsada Tahi	Tidak Aktif
97	Garoga	Lontung Jae I	Marsada	Tidak Aktif
98	Garoga	Simpang Bolon	Dos Roha	Tidak Aktif
99	Sipoholon	Lobu Singkam	Mekar Jaya	Aktif
100	Pahae Jae	Suka Maju	Maju Bersama	Aktif
101	Pahae Jae	Nahornop Marsada	Marsada	Tidak Aktif
102	Pahae Jae	Parsaoran Samosir	Samosir	Aktif
103	Pahae Jae	Sitolu ompu	Bersatu	Aktif
104	Pahae Jae	Sigurung gurung	Satahi	Tidak Aktif
105	Pahae Jae	Parsaoran Nainggolan	Tunas Parsaoran	Tidak Aktif
106	Pahae Jae	Pardamean Nainggolan	Pardamean	Tidak Aktif
107	Pahae Jae	Tordolok Nauli	Sian hita tu hita	Tidak Aktif
108	Pahae Jae	Setia	Setia Maju	Tidak Aktif
109	Pahae Jae	Pardomuan Nainggolan	Pardomuan	Aktif
110	Pahae Jae	Silangkitang	Silangkitang	Tidak Aktif
111	Pahae Jae	Siopat Bahal	Dalihan Natolu	Tidak Aktif
112	Adiankoting	Dolok Nauli	Tunas Harapan	Aktif
113	Adiankoting	Banuaji I	Nauli	Aktif
114	Adiankoting	Pagaran Lambung I	Pagaran Lambung I	Tidak Aktif
115	Adiankoting	Pagaran Lambung II	Pagaran Lambung II	Tidak Aktif
116	Pagaran	Banualuhu	Berdikari	Tidak Aktif
117	Pagaran	Dolok Saribu	Karya Bersama	Tidak Aktif
118	Pagaran	Lumban Motung	Mutiara	Aktif
119	Pagaran	Lumban Silintong	Muda Karya	Tidak Aktif
120	Pagaran	Sibaragas	Berdikari	Aktif
121	Parmonangan	Huta Tinggi	Andalan Mandiri	Tidak Aktif
122	Parmonangan	SISORDAK	Terpadu	Aktif
123	Parmonangan	Batuarimo	Karya Maju	Aktif

Program yang mendukung indikator tersebut yaitu program administrasi Pemerintahan Desa yaitu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa melalui fasilitasi dan pembinaan pengurus BUMDesa ke Desa. Dari BUMDes tersebut diatas, sudah ada BUMDesa yang sudah berPADES yaitu :

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama BUM Desa	Unit Usaha	PADES	Status
1	Siatas Barita	Lumban Siagian Julu	Gabe Jaya	Manajemen Air Minum Desa, Sewa Alat Musik Pesta, Kios Desa	3.000.000	Aktif
2	Sipahutar	Sipahutar II	Marsada	Pupuk Bersubsidi, Air Bersih, Transportasi	400.000	Aktif
3	Sipahutar	Sipahutar I	Sipasada	Peternakan	2.000.000	Aktif
4	Sipahutar	Sabungan Nihuta II	Martabe	Kios Pupuk	3.771.000	Aktif
5	Tarutung	Hutatoruan IV	Hariara Nommensen	Peternakan B2. Pupuk. Benang	500.000	Aktif
6	Parmonangan	Sisordak	Terpadu	Kios Pupuk	7.200.000	Aktif
Total					16.871.000	

Tahun 2023 Tapanuli Utara mengikuti Perlombaan BUMDes Tk. Provinsi dan mendapatkan Posisi 10 (sepuluh) besar BUMDes Terbaik Se-Sumatera Utara.



Program yang mendukung indikator tersebut yaitu program administrasi Pemerintahan Desa yaitu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa melalui fasilitasi dan pembinaan pengurus BUMDesa ke Desa

Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif yaitu :

Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
Program Administrasi Pemerintahan Desa  Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	50 Dokumen	Adanya pengurus BUMDesa yang tidak aktif dan kurang memahami tentang tatacara penatausahaan BUMDesa	tetap melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BUMDesa agar tetap sehat dan berjalan dengan baik

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indicator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	70,000,100	69,071,000	99%	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### 6. Jumlah BUMDesMa yang terbentuk

BUMDesa Bersama yang terbentuk Tahun 2023 sebanyak 8 Bumdesa Bersama pada 8 Kecamatan. Bumdesa Bersama yang dibentuk merupakan peralihan dari Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM-MPd sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 untuk jumlah BUMDesMa yang terbentuk realisasi 8. Berbagai kegiatan dilakukan dengan turun langsung ke Kecamatan melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa antara lain Rapat Koordinasi Percepatan Peralihan DBM Eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama, Sosialisasi dan Musyawarah Antar Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Adiankoting, Siatas Barita, Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan, Garoga, Tarutung.

#### Daftar BUMDesMa Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama BUMDesMa	Jenis Usaha	Ket.
1	Siatas Barita	Losida	Budidaya Lebah Madu	
2	Siborongborong	Ombusombus Las Kede	Simpan Pinjam Perempuan	
3	Pahae Jae	Patupa Tu Nadenggan	Simpan Pinjam Perempuan	
4	Sipahutar	Honas Sipahutar Najogi	Simpan Pinjam Perempuan, Peternakan Ayam	
5	Sipoholon	Nauli Marsada	Simpan Pinjam Perempuan	

6	Parmonangan	Nauli Dalihan Natolu	Simpan Pinjam Perempuan	
7	Pagaran	Rap Margogo	Simpan Pinjam Perempuan	
8	Muara	Mangga Udang Natonggi	Simpan Pinjam Perempuan	
9	Tarutung	Rura Silindung Nauli	Simpan Pinjam Perempuan	
10	Siatas Barita	Bintang Maratur	Simpan Pinjam Perempuan	
11	Adiankoting	Raptaruli	Simpan Pinjam Perempuan	
12	Pahae Julu	Rap Martahi	Simpan Pinjam Perempuan	
13	Purbatua	Pahae Hasundutan	Simpan Pinjam Perempuan	
14	Simangumban	Pisang Barangan	Simpan Pinjam Perempuan	
15	Pangaribuan	Dolok Saut Nauli	Simpan Pinjam Perempuan	
16	Garoga	Lugana	Simpan Pinjam Perempuan	



Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase BUMDesMa yang terbentuk yaitu :

Kegiatan	Target	Realisasi	Penyebab Keberhasilan	Solusi yang dilakukan	Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 dokumen	3 dokumen	Adanya pendampingan dalam pembentukan BUMDesMa dan partisipasi beberapa desa	Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendes Nomor 15 Tahun	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Jabatan Fungsional Tertentu

			dengan turun langsung dan antusias Pemerintah Desa dan pengurus SPP Eks PNPM-MPd	2021 tentang Tata Cara Peralihan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd sehingga SPP Eks PNPM-MPd dapat dibentuk menjadi BUMDesMa	
--	--	--	--	--	--

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Pelaksana Teknis Kegiatan
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	116,647,200	114,743,950	98%	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### 7. Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat

Target Nilai AKIP Tahun 2023 sebesar 78 namun Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat realisasi sebesar 65,97 atau sebesar 84%. Pada Tahun 2022 dilakukan perubahan RENSTRA sesuai dengan hasil review Tim Sakip. Perubahan Renstra diharapkan dapat meningkatkan nilai Sakip Kabupaten sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja dapat diukur dengan indikator yang mendukung tujuan yang didalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Tahun 2022 sebesar 77 namun Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat realisasi yang dicapai sebesar 65,23 atau sebesar 84%.

#### B. Realisasi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menangani urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) anggaran sebesar Rp.5.933.153.639,- dan terealisasi sebesar Rp.5.792.461.956,- atau 97,63%. Sisa anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar **140.691.683,-** atau sebesar 2,32% yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran		
	Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,034,800,430</b>	<b>2,706,470,260</b>	<b>89%</b>
<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8,520,000</b>	<b>8,355,650</b>	<b>98%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	2,862,650	95%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,520,000	5,493,000	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,608,779,030</b>	<b>2,526,071,527</b>	<b>97%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,553,805,730	2,473,064,777	97%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,313,200	49,406,200	96%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,660,100	3,600,550	98%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>121,673,600</b>	<b>119,597,931</b>	<b>98%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,487,000	99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,000,000	6,326,450	79%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,500,000	4,476,700	99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,172,600	8,113,300	99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,501,000	98,194,481	100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
pengadaan mebel	-	-	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>241,887,200</b>		<b>0%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400,000	400,000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,500,000	17,847,020	76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217,987,200	214,790,920	99%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53,940,600</b>	<b>52,445,152</b>	<b>97%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,559,100	48,063,652	97%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,381,500	4,381,500	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	414,917,100	401,948,448	97%
<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	414,917,100	401,948,448	97%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	414,917,100	401,948,448	97%
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1,772,923,800</b>	<b>1,750,230,470</b>	<b>99%</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1,772,923,800</b>	<b>1,750,230,470</b>	<b>99%</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	56,788,000	51,631,250	91%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	77,095,000	76,078,596	99%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	70,000,100	69,071,000	99%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1,556,210,000	1,541,434,424	99%
Fasilitasi pengelolaan aset desa	588,100	-	0%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4,905,000	4,777,600	97%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7,337,600	7,237,600	99%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>710,512,300</b>	<b>700,774,838</b>	<b>99%</b>
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>710,512,300</b>	<b>700,774,838</b>	<b>99%</b>
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	166,527,500	166,527,509	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100,000,000	99,436,900	99%

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327,337,600	320,066,479	<b>98%</b>
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	116,647,200	114,743,950	<b>98%</b>

Tingkat capaian efisiensi anggaran = capaian kinerja – capaian anggaran

= 96 % - 97%

= 1 %

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran utama dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang tercermin dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis telah memenuhi target yang direncanakan. Persentase capaian realisasi indikator kinerja utama dari sasaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 96 % dengan kategori "tinggi". Sedangkan jika dilihat dari akuntabilitas keuangan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.5.933.153.639,- dan terealisasi sebesar Rp.5.792.461.956,- atau 97%. *(data sebelum audit oleh BPK).*

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu pencapaian target kinerja di tahun supaya lebih maksimal.

Tarutung, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA,

  
DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM  
PEMBINA  
NIP. 197408112003121003

## **LAMPIRAN**

EVALUASI TERHADAP RENCANA AKSI TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan ( 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Triwulan 2023												Kealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi			Penanggungjawab		
						I			II			III			IV			10			11		
						K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.
1	meningkatkan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	persen	3,034,800,630	25%	persen	493,927,644	25%	persen	1,194,951,621	25%	persen	506,859,213	25%	persen	743,769,722	100%	persen	2,939,508,200	Sekretaris	Sekretaris
2		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja	100%	persen	8,520,000	75%	persen	2,758,000	75%		2,853,600	25%	persen	913,000	25%	persen	1,831,050	100%	persen	8,355,650	Sekretaris	Kaubbag Program
1		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	terselenggaranya penyusunan laporan kinerja	1	laporan	3,000,000	1	laporan	-	0	laporan	1,981,600	-	laporan	-	-	laporan	881,050	1	laporan	2,862,650	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	5,520,000	3	Laporan	2,758,000	3	Laporan	872,000	3	Laporan	913,000	3	Laporan	950,000	12	Laporan	5,493,000	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
5		Administrasi Keuangan perangkat daerah	terlaksananya administrasi keuangan	100%	persen	2,608,779,030	25%		408,086,119	25%		1,085,476,367	25%		412,974,645	25%		619,534,396	100%		2,526,071,527	Sekretaris	salah kebijakan
6		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi KEuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan	12	Dokumen	51,313,200	3	Dokumen	-	3	Dokumen	12,828,300	3	Dokumen	12,828,300	3	Dokumen	23,749,600	12	Dokumen	49,406,200	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3,660,100	1	Laporan	3,070,200	0	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	530,350	1	Laporan	3,600,550	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
8		Penediaian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2,553,805,730	3	Bulan	405,015,919	3	Bulan	1,072,648,067	3	Bulan	400,146,345	3	Bulan	595,254,446	12	Bulan	2,473,064,777	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
9		Administrasi Umum perangkat daerah	terselenggaranya Administrasi Umum	100%	persen	121,673,800	25%		17,848,950	25%		35,090,329	25%		26,753,001	25%		39,905,651	100%		119,597,931	Sekretaris	Kaubbag Umum
10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	2,500,000	1	Paket	1,243,450	1	Paket	214,549	1	Paket	814,251	1	Paket	214,750	4	Paket	2,487,000	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	8,000,000	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	6,326,450	1	Paket	-	4	Paket	6,326,450	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Paket	4,500,000	1	Paket	1,869,600	1	Paket	867,000	1	Paket	865,100	1	Paket	875,000	4	Paket	4,478,700	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
13		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Paket	8,172,800	1	Paket	3,456,900	1	Paket	1,482,200	1	Paket	1,622,200	1	Paket	1,552,000	4	Paket	8,113,300	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
14		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
15		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	98,501,000	3	Laporan	11,279,000	3	Laporan	32,526,580	3	Laporan	17,125,000	3	Laporan	37,263,901	12	Laporan	98,194,481	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
16		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	persen	-	0		0	0		-	-		-	-		-	0		-	Sekretaris	Kaubbag Program
17		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-	Sekretaris	Jabatan Pelaksana
18		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-	Sekretaris	Jabatan Pelaksana

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan ( 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Triwulan 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi			Penanggungjawab						
				5		I			II			III			IV			10			11						
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Rp.	K				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
19		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persen	241,887,200	25%		56,492,775	25%		56,221,375	25%		60,942,317	25%		59,381,473	100%		233,037,940	Sekretaris	Kasubbag Umum				
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	400,000		3	Laporan	200,000		3	Laporan	-		3	Laporan	200,000	12	Laporan	400,000	Sekretaris	Jabatan Pelaksana				
21		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	23,500,000		3	Laporan	1,839,685		3	Laporan	2,371,465		3	Laporan	7,759,673	12	Laporan	17,847,020	Sekretaris	Jabatan Pelaksana				
22		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	217,987,200		3	Laporan	54,453,090		3	Laporan	53,849,910		3	Laporan	51,427,800	12	Laporan	214,790,920	Sekretaris	Jabatan Pelaksana				
23		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persen	53,940,600	25%		8,741,800	25%		15,309,950	25%		5,276,250	25%		23,117,152	100%		52,445,152	Sekretaris	Kasubbag Umum				
24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakns	8	Unit	49,559,100		0	Unit	7,281,300		1	Unit	14,349,450		1	Unit	4,315,750	6	Unit	22,117,152	8	Unit	48,063,652	Sekretaris	Jabatan Pelaksana	
25		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	Unit	4,381,500		3	Unit	1,460,500		4	Unit	960,500		3	Unit	960,500	4	Unit	1,000,000	14	Unit	4,381,500	Sekretaris	Jabatan Pelaksana	
26		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	Unit	-		0	Unit	-		0	Unit	-		-	Unit	-	0	Unit	-	-	Sekretaris	Jabatan Pelaksana			
27	meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan fasilitas pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	100%	persen	1,772,923,700			1,196,478,200	19%			20%			25%					1,750,230,470	Pendes dan Kerjasama Desa, Penataan Desa dan PUEM	Pendes dan Kerjasama Desa, Penataan Desa dan PUEM				
28		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang lebih baik	100%	persen	1,772,923,700	18%		1,196,478,200	19%				20%				60,479,750			430,294,720	0%	1,750,230,470	Pendes dan Kerjasama Desa, Penataan Desa dan PUEM	Penggerak swadaya masyarakat		
29		Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	160	Dokumen	56,788,000		7	Dokumen	8,201,000		11	Dokumen	9,990,700		70	Dokumen	8,794,900	62	Dokumen	24,644,650	150	Dokumen	51,631,250	Kabid Adm Pendes	Jabatan Pelaksana	
30		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	7	Dokumen	77,095,000		1	Dokumen	-		3	Dokumen	40,080,900		1	Dokumen	14,183,250	2	Dokumen	21,814,446	7	Dokumen	76,078,596	Kabid Penataan Desa	Jabatan Pelaksana	
31		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	0	Dokumen	588,100		0	Dokumen	-		0	Dokumen	-		-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	Dokumen	-	Kabid Penataan Desa	Jabatan Pelaksana
32		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	50	Dokumen	70,000,000		13	Dokumen	4,520,000		15	Dokumen	11,863,600		15	Dokumen	30,641,600	7	Dokumen	22,045,800	50	Dokumen	69,071,000	Kabid PUEM	Jabatan Pelaksana	
33		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	Dokumen	4,905,000		0	Dokumen	-		0	Dokumen	-		0	Dokumen	750,000	1	Dokumen	4,027,600	1	Dokumen	4,777,600	Kabid PUEM	Jabatan Pelaksana	
34		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	42	Laporan	1,556,210,000		42	Laporan	1,183,672,200		0	Laporan	-		0	Laporan	-	-	Laporan	357,762,224	42	Laporan	1,541,434,424	Kabid Adm Pendes	Jabatan Pelaksana	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan ( 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Triwulan 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi			Penanggungjawab	
							I			II			III			IV							
				K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Rp.	K
				5	6	7	8	9	10	11													
15		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	241	Dokumen	7,337,600	10	Dokumen	85,000	15	Dokumen	1,042,600	45	Dokumen	6,110,000	129	Dokumen	-	199	Dokumen	7,237,600	Kabid Adm Pendes	Jabatan Pelaksana
36		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi	100%	persen	710,512,309	100%		44,625,600	100%		203,885,592	100%		107,113,500	100%		344,830,080	100%		700,454,772	Kabid PUEM dan Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Penguatan/Pengembangan Sosial budaya dan Partisipasi Masyarakat	Kabid PUEM dan kelembagaan
37		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten aktif	100%	persen	710,512,309	100		44,625,600	100		203,885,592	100		107,113,500	100		-	100%		700,454,772	Penggerak swadaya masyarakat	
38		Fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	1	Dokumen	166,527,509	0	Dokumen	-	1	Dokumen	166,527,509	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	166,527,509	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Penguatan/Pengembangan Sosial budaya dan Partisipasi Masyarakat	Jabatan Pelaksana
39		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1	bulan	327,337,600	0	bulan	25,955,600	0	bulan	10,188,083	0	bulan	70,856,350	1	bulan	213,066,446	1	bulan	320,066,479	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Penguatan/Pengembangan Sosial budaya dan Partisipasi Masyarakat	Jabatan Pelaksana
40		Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	195	lembaga	100,000,000	48	lembaga	10,819,000	48	lembaga	24,030,000	49	lembaga	23,324,900	50	lembaga	40,942,934	195	lembaga	99,116,834	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Penguatan/Pengembangan Sosial budaya dan Partisipasi Masyarakat	Jabatan Pelaksana
41		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3	Dokumen	116,647,200	1	Dokumen	7,851,000	1	Dokumen	3,140,000	0	Dokumen	12,932,250	1	Dokumen	90,820,700	3	Dokumen	114,743,950	Kabid PUEM	Jabatan Pelaksana
42		Program Peningkatan Kerjasama Desa	cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	100%	persen	414,917,100	25%		57,093,264	25%		128,445,684	25%		95,795,412	25%		120,614,088	100%		401,948,448	Kabid Administrasi Pemerintahan Desa	Kabid Administrasi Pemerintahan Desa
43		Fasilitasi Kerjasama antar desa	terseleksi/anggota fasilitasi kerjasama desa	100%	persen	414,917,100	25%		57,093,264	25%		128,445,684	25%		95,795,412	25%		120,614,088	100%		401,948,448	Kabid Administrasi Pemerintahan Desa	swadaya masyarakat



Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

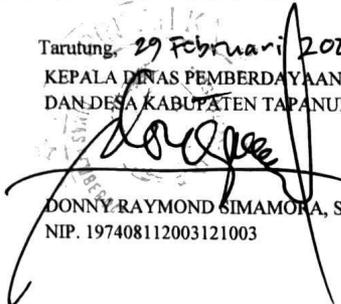
NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2023 sebelum perubahan		Rencana Tahun 2023 Setelah Perubahan		Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
		<b>cakupan layanan penunjang yang tertangani</b>	100%	<b>3,376,743,765</b>	100%	<b>3,020,800,430</b>	
	2.13.01.2.01	<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
		<b>terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja</b>	1 Tahun	<b>15,035,000</b>	1 Tahun	<b>8,520,000</b>	
	2.13.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	3,000,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	11,035,000	12 laporan	5,520,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
		<b>terlaksananya administrasi keuangan</b>	1 Tahun	<b>2,897,753,865</b>	1 Tahun	<b>2,594,779,030</b>	
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,841,440,665	31 Orang/bulan	2,539,805,730	
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51,313,200	12 Dokumen	51,313,200	
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,000,000	1 laporan	3,660,100	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
		<b>terselenggaranya administrasi umum</b>	1 Tahun	<b>126,178,100</b>	1 Tahun	<b>121,673,600</b>	
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	5,000,000	4 paket	2,500,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	14,000,000	4 paket	8,000,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	7,500,000	4 paket	4,500,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	14,015,700	4 paket	8,172,600	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	5,997,400	12 Dokumen	-	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	79,665,000	12 Laporan	98,501,000	adanya penambahan anggaran

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2023 sebelum perubahan		Rencana Tahun 2023 Setelah Perubahan		Keterangan	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
	<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29,002,100</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
	2.13.01.2.07.05	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	9,000,000	0	-	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangb disediakan	2 unit	20,002,100	0	-	adanya reconfusing anggaran
	<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>tersedianya jasa penunjang urusan kantor</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>250,787,200</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>241,887,200</b>	
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	800,000	1 Laporan	400,000	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	32,000,000	1 Laporan	23,500,000	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	217,987,200	12 Laporan	217,987,200	
	<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terselenggaranya pemeliharaan</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>57,987,500</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>53,940,600</b>	
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	51,145,500	8 unit	49,559,100	adanya reconfusing anggaran
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	6,842,000	14 unit	4,381,500	adanya reconfusing anggaran
<b>2</b>	<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>cakupan kerjasama desa yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>414,917,100</b>	
	2.13.03.2.01	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>414,917,100</b>	
	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	241 Dokumen	300,000,000	241 Dokumen	414,917,100	adanya penambahan jumlah peserta BPJS dari perangkat desa
<b>3</b>	<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa</b>	<b>100%</b>	<b>1,779,337,600</b>	<b>100%</b>	<b>1,772,923,800</b>	
	2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>terselenggaranya administrasi Pemerintahan Desa yang lebih baik</b>	<b>100%</b>	<b>1,779,337,600</b>	<b>100%</b>	<b>1,772,923,800</b>	
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	160 Dokumen	80,000,000	160 Dokumen	56,788,000	adanya reconfusing anggaran

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2023 sebelum perubahan		Rencana Tahun 2023 Setelah Perubahan		Keterangan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 dokumen	85,000,000	7 dokumen	77,095,000	adanya recofusing anggaran
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	70,000,000	50 Dokumen	70,000,100	
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1,512,000,000	1 Laporan	1,556,210,000	adanya penambahan anggaran karen 1 desa Pilkades ulang
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	241 dokumen	15,000,000	241 dokumen	588,100	adanya recofusing anggaran
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	4,905,000	adanya recofusing anggaran
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen profil desa yang tersusun	241 Dokumen	7,337,600	241 Dokumen	7,337,600	
4	2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum</b>	100%	657,334,800	100%	710,512,300	
	2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif</b>	100%	657,334,800	100%	710,512,300	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	166,527,500	adanya recofusing anggaran

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2023 sebelum perubahan		Rencana Tahun 2023 Setelah Perubahan		Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	195 lembaga	100,000,000	195 lembaga	100,000,000	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	327,337,600	1 unit	327,337,600	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3 dokumen	29,997,200	3 dokumen	116,647,200	adanya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembentukan BUMDesMa dari Simpan Pinjam Eks
				<b>6,113,416,165</b>		<b>5,919,153,630</b>	

Tarutung, 29 Februari 2024  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

  
 DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM  
 NIP. 197408112003121003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Donny Raymond Simamora, S.IP, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si.**

Jabatan : Bupati Tapanuli Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si.**

Tarutung, 25 Oktober 2023

Pihak Pertama,

**Donny Raymond Simamora, S.IP, MM**  
Pembina  
NIP 197408112003121003

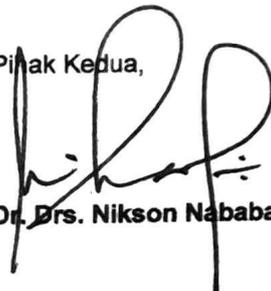
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	98
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	15
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	80
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	65
		6	Jumlah BUMDesMa yang terbentuk	Jumlah	16
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	78

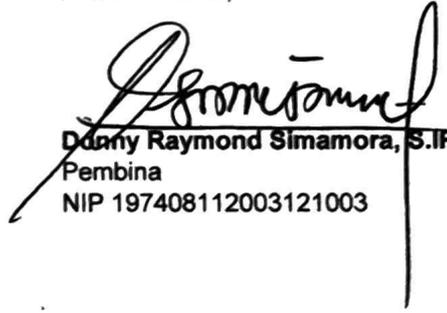
No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 3,020,800,430	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 414,917,100	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1,772,923,800	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 710,512,309	APBD

Tarutung, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua,

  
**Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si.**

Pihak Pertama,

  
**Denny Raymond Simamora, S.IP, MM**  
 Pembina  
 NIP 197408112003121003